



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Jakarta, 24 Juni 2024

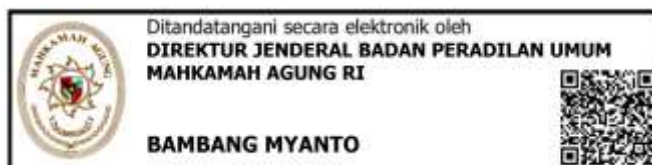
Nomor : 152/DJU/UND.HK2.5/VI/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Zoom Meeting Webinar
"Kebijakan Kelembagaan untuk Penguatan
Kepemimpinan Hakim Perempuan"

Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim
Perempuan pada Lingkungan
Peradilan Umum
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I. Nomor 46/KM.PDT/UND.HK2.5/VI/2024 Tanggal 14 Juni 2024, bersama ini kami minta kepada saudara untuk mengikuti Webinar "Kebijakan Kelembagaan untuk Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan" dalam rangka Perayaan 20 Tahun Kerjasama Peradilan MARI dan FCFCOA secara daring pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
Pukul : 13.30-16.30 WIB
Ruang Virtual : <https://bit.ly/KepemimpinanHakimPerempuan>
Meeting ID: 893 8388 1223 Passcode: 051260
Agenda : (terlampir)

Demikian yang dapat disampaikan, agar dapat dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung R.I.;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial.
3. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Lampiran 1.

Kerangka Acuan *Webinar* dalam rangka Perayaan 20 Tahun Kerjasama Peradilan MARI dan FCFCOA

”Kebijakan Kelembagaan untuk Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan”

Selasa, 25 Juni 2024 jam 13.30-16.30 WIB

A. Pendahuluan

Mahkamah Agung Republik Indonesia mendukung pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) khususnya Tujuan ke-5 dan 16, sebagai bentuk kontribusi tanggung jawab global terhadap kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga publik seperti peradilan. Pada tahun 2021, Pelapor Khusus PBB untuk Kemerdekaan Hakim dan Pengacara, Diego García-Sayán, menerbitkan laporan: Partisipasi Perempuan dalam Administrasi Kehakiman. Laporan tersebut menemukan bahwa: “Perempuan mewakili persentase yang sangat rendah dalam hierarki sistem peradilan. Di banyak negara, statistik menunjukkan bahwa persentase perempuan dalam posisi senior baik di lembaga peradilan maupun kejaksaan tidak sebanding dengan jumlah perempuan dalam kedua karier tersebut, perempuan cenderung menjadi mayoritas anggota dalam persentase keseluruhan, namun kehadiran mereka di posisi senior jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Komitmen Mahkamah Agung terhadap upaya peningkatan kepemimpinan hakim perempuan ditunjukkan dengan dilaksanakannya dialog dengan institusi internasional dan pimpinan-pimpinan dari negara lain mengenai bagaimana meningkatkan representasi dan kepemimpinan hakim perempuan di peradilan, juga dengan memberi dukungan pada hakim perempuan di Indonesia untuk berkiprah dalam wadah Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah dengan menjalin kerjasama yudisial dengan Federal Circuit & Family Court of Australia (FCFCOA) dalam menyelenggarakan dialog kedua negara maupun skala internasional mengenai peningkatan kepemimpinan hakim perempuan di peradilan. Isu ini merupakan salah satu area kerjasama yudisial dari kedua negara sejak MoU tahun 2017, yang dimulai dengan pengumpulan data representasi hakim perempuan di peradilan, wawancara dengan salah satu pimpinan pengadilan perempuan serta dialog internasional pada tahun 2021 yang juga mengundang narasumber dari negara lain selain Indonesia dan Australia.

Pada bulan Oktober 2022, FCFCOA menjadi tuan rumah bagi delegasi Mahkamah Agung untuk membahas lebih jauh mengenai peningkatan kepemimpinan hakim perempuan di peradilan. Pertemuan tersebut selain melibatkan Pimpinan Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal dari keempat lingkungan badan peradilan di Indonesia, juga mengundang hakim agung dari Pakistan, Australia dan Selandia Baru yang dikemas dalam bentuk webinar (*hybrid*) yang bisa diikuti oleh hakim se-Indonesia. Hadir dalam dialog tersebut, Presiden Asosiasi Hakim Perempuan Internasional

(*International Association of Women Judges/IAWJ*) saat itu, yaitu the Hon. Justice Susan Glazebrook dari Selandia Baru.

Dialog tersebut ditindaklanjuti dengan mengirimkan delegasi hakim perempuan Indonesia ke Konferensi Dua Tahunan ke-16 IAWJ yang diadakan di Marrakesh pada 10-14 Mei 2023. Delegasi MARI terdiri dari 2 (dua) hakim agung perempuan dan 4 (empat) hakim perempuan Indonesia yang mewakili keempat lingkungan peradilan yang difasilitasi oleh AIPJ2 dan 1 (satu) orang hakim yustisial dan Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan yang difasilitasi oleh Mahkamah Agung. Ketua delegasi hakim perempuan Indonesia, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., mempresentasikan perkembangan representasi hakim perempuan di Indonesia, capaian, tantangan dan hambatan yang dihadapi serta temuan Survei Persepsi Kepemimpinan Hakim Perempuan pada Konferensi tersebut. Survei ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Mahkamah Agung ke FCFCOA di Melbourne pada Oktober 2022. Survei ini melibatkan Direktorat Jenderal dari keempat lingkungan peradilan, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, dan penasehat senior AIPJ2. Pada bulan April 2023, lebih dari 5000 hakim Indonesia telah menyelesaikan survei online tersebut. Survei ini merupakan salah satu survei terbesar dari jenisnya, yang hasilnya dipresentasikan di konferensi IAWJ 2023. Sepulang dari konferensi, delegasi hakim perempuan Mahkamah Agung menyampaikan laporan pelaksanaan keikutsertaan dalam konferensi IAWJ tersebut kepada Pimpinan Mahkamah Agung, termasuk rekomendasi pembentukan sebuah wadah atau asosiasi Hakim perempuan Indonesia.

Rekomendasi ini didukung baik oleh Pimpinan Mahkamah Agung maupun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Pada 27 September 2023, Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) di deklarasikan sebagai salah satu badan dalam wadah IKAHI dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. ditunjuk sebagai Ketua BPHPI. Pada momen deklarasi tersebut, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Umum IKAHI meminta agar BPHPI berkontribusi dan mengambil peran dalam upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan representasi dan kepemimpinan hakim perempuan di peradilan.

Kiprah pertama BPHPI adalah menyelenggarakan seminar internasional pada bulan April 2024 yang mengundang narasumber dari nasional maupun internasional seperti Malaysia, Filipina dan Australia dan mengambil topik "Peningkatan Kepemimpinan Hakim Perempuan Menuju Badan Peradilan yang Agung". Seminar ini diselenggarakan sekaligus untuk merayakan Hari Perempuan Internasional (8 Maret), Hari Hakim Perempuan Internasional (10 Maret) dan Hari Kartini (21 April). Pada kesempatan ini, The Hon. Chief Justice Alstergren dan The Hon. Justice Suzanne Christie dari FCFCOA hadir sebagai narasumber.

Pada tanggal 24 s.d. 28 Juni 2024 yang akan datang, Mahkamah Agung RI akan menerima kunjungan delegasi FCFCOA dan juga Federal Court of Australia (FCA) yang diagendakan untuk pelaksanaan pembaruan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial sekaligus perayaan 20 (dua puluh) tahun kerjasama yudisial antara Mahkamah Agung dengan FCFCOA, dan Mahkamah Agung dengan FCA. Sebagai bagian dari rangkaian perayaan

kerjasama dan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, Mahkamah Agung RI bermaksud menyelenggarakan webinar dengan topik **“Kebijakan Kelembagaan untuk Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan.”** Webinar ini bertujuan untuk mendiskusikan dan pertukaran pengetahuan antara Mahkamah Agung dan FCFCOA tentang tantangan dan peluang untuk menyusun kebijakan kelembagaan yang memperkuat akses dan kesempatan bagi hakim perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi hakim perempuan secara menyeluruh.

B. Maksud dan Tujuan

Webinar ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi forum pertukaran pengetahuan antara Mahkamah Agung dan FCFCOA mengenai:
 - a. Representasi hakim perempuan di Mahkamah Agung dan FCFCOA
 - b. Model mentoring bagi hakim perempuan yang dipraktekkan di Australia dan negara lain untuk mewujudkan peningkatan kepemimpinan hakim perempuan
2. Menyediakan forum kepada BPHPI untuk mensosialisasikan susunan pengurus periode 2023-2026 dan program kerja yang akan dilaksanakan untuk mendukung Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan kepemimpinan hakim perempuan.
3. Menjadi forum diskusi dan interaksi dengan hakim perempuan se-Indonesia mengenai tantangan, hambatan dan harapan dalam membangun karir profesional di pengadilan.
4. Dialog dengan Direktur Jenderal keempat lingkungan peradilan serta Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung mengenai perkembangan data terpilah gender dari hakim (perempuan dan laki-laki), serta visi dalam mendorong kemajuan peran kepemimpinan dan peningkatan kapasitas hakim perempuan di Indonesia.

Kesimpulan dari webinar ini akan digunakan untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan FCFCOA dalam kerangka kerjasama di periode 2024-2026.

Lampiran 2.

Agenda Webinar dalam rangka Perayaan 20 Tahun Kerjasama Peradilan MARI dan FCFCOA

”Kebijakan Kelembagaan untuk Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan”

Selasa, 25 Juni 2024 jam 13.30-16.30 WIB

Waktu	Deskripsi Acara
13.30-13.33	Pembukaan dari MC
13.33-13.40	Lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI
13.40-13.50	Sambutan Ketua MA RI, YM Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
13.50-14.00	Sambutan The Hon. Chief Justice William Alstergren
14.00-14.05	Pengantar dari Moderator
14.05-14.20	Presentasi dari Ketua BP HPI, YM. Nani Indrawati mengenai: <ul style="list-style-type: none">• Perkembangan baseline data terpilah gender mengenai hakim perempuan di Indonesia• Sejarah berdirinya BP HPI, Susunan Tim Pengurus BP HPI dan kegiatan yang sudah dan sedang dilakukan• Rencana kegiatan BP HPI untuk periode 2023-2026.
14.20-14.40	Presentasi dari Judge Liz Boyle, FCFCOA mengenai <ul style="list-style-type: none">• Representasi hakim perempuan serta proses promosi dan pengangkatan hakim di Australia• Beberapa gagasan tentang model pendampingan (sistem mentoring) dan bagaimana pendampingan merupakan bagian dari upaya untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan hakim serta membantu mengatasi permasalahan yang muncul selama menjadi hakim.• Pendampingan juga merupakan bagian penting dalam membangun dialog yang terpercaya antara mentor dan hakim yang didampingi mengenai isu-isu sensitif seputar teladan perilaku peradilan yang tepat baik di dalam maupun di luar pengadilan.• Beberapa tantangan tersebut disebutkan dalam Webinar Internasional tanggal 27 April seputar hakim yang mengalami kekerasan keluarga dan menghadapi kekerasan serta intimidasi dalam menjalankan tugasnya.
14.40-15.10	Tanggapan dari (masing-masing 7 menit): <ul style="list-style-type: none">• Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI mengenai update data terpilah (perempuan dan laki-laki): (i) pimpinan pengadilan di peradilan umum tahun 2023, (ii) jumlah hakim peradilan umum yang dipanggil Fit & Proper Test• Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI mengenai update data terpilah (perempuan dan laki-

Waktu	Deskripsi Acara
	<p>laki): (i) pimpinan pengadilan di peradilan agama tahun 2023, (ii) jumlah hakim peradilan agama yang dipanggil Fit & Proper Test</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN MARI mengenai update data terpilah (perempuan dan laki-laki): (i) pimpinan pengadilan di peradilan Militer dan TUN tahun 2023, (ii) jumlah hakim Militer dan TUN yang dipanggil Fit & Proper Test • Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MARI mengenai data terpilah (hakim perempuan dan laki-laki): (i) calon hakim dalam 2 rekrutmen terakhir, (ii) hakim yang menerima pelatihan
15.10-16.05	Sesi Interaktif - tanya Jawab dengan Hakim Perempuan se-Indonesia (online)
16.05-16.15	Kesimpulan (peluang tindak lanjut program dan kebijakan untuk dilaksanakan oleh MARI dan BPHPI)
16.15-16.30	<i>Closing remarks</i> dari Mahkamah Agung RI dan FCFCOA